

RINGKASAN

FAIZAL DILFI PUTRA, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Jenderal Soedirman, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Fidusia Di Wilayah Hukum Polres Purbalingga", Komisi Pembimbing, Dr. Setya Wahyudi, S.H., M.H. Anggota, Dr. Budiyo, S. H., M.Hum.

Permasalahan pokok yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah efektivitas penegakan hukum tindak pidana fidusia di wilayah hukum Polres Purbalingga dan kendala yang dihadapi Polres Purbalingga dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana fidusia. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis, bersifat deskriptif. Lokasi Penelitian Polres Purbalingga. Pengumpulan data primer dengan wawancara, data sekunder studi kepustakaan. Data disajikan dalam bentuk uraian, data di analisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Penegakan hukum tindak pidana fidusia di wilayah hukum Polres Purbalingga belum efektif, karena sebagian besar kasus yang ditangani tidak dapat ditingkatkan dan dilimpahkan ke Kejaksaan (penghentian penyelidikan), dimana dari 32 (tiga puluh dua) kasus fidusia, hanya ada 2 (dua) yang dilimpahkan ke Kejaksaan. Kendala yang dihadapi Polres Purbalingga dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana fidusia, berupa kendala dari aspek struktur dan kultur sebagai berikut :

- a. Struktur: penyidik kesulitan untuk menemukan barang bukti kendaraan bermotor karena sudah berpindah tangan ke beberapa orang yang tempat tinggalnya tidak jelas.
- b. Kultur: masyarakat kurang memahami terhadap hukum terkait dengan jaminan fidusia. Sehingga masih banyak penerima Fidusia yang belum mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia Ke Kantor Pendaftaran Fidusia dan masih banyak pula pemberi fidusia yang mengalihkan barang jaminan fidusia tersebut ke orang lain tanpa izin kepada penerima fidusia (perusahaan leasing), padahal perbuatan tersebut merupakan tindak pidana.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Fidusia.

SUMMARY

FAIZAL DILFI PUTRA, Master of Law Study Program, Postgraduate Program, Jenderal Soedirman University, "Fiduciary Crime Law Enforcement in the Legal Area of the Purbalingga Police", Advisory Commission, Dr. Setya Wahyudi, S.H., M.H. Member, Dr. Budiyo, S. H., M. Hum.

The main issues discussed in this study are the effectiveness of law enforcement on fiduciary crimes in the jurisdiction of the Purbalingga Police and the obstacles faced by the Purbalingga Police in enforcing the law on fiduciary crimes. This research was conducted using a research method with a sociological juridical approach, which is descriptive in nature. Purbalingga Police Research Location. Primary data collection by interviews, secondary data literature study. The data is presented in the form of a description, the data is analyzed qualitatively.

Based on the results of the research and discussion, it can be concluded as follows: Law enforcement of fiduciary crimes in the jurisdiction of the Purbalingga Police has not been effective, because most of the cases handled cannot be increased and delegated to the Prosecutor's Office (termination of investigation), where out of 32 (thirty two)) fiduciary cases, only 2 (two) were delegated to the Attorney. Obstacles faced by the Purbalingga Police in enforcing the law on fiduciary crimes, in the form of obstacles from structural and cultural aspects as follows:

- a. Structure: investigators have difficulty finding evidence of motorized vehicles because they have changed hands to several people whose residence is not clear.*
- b. Culture: people do not understand the law related to fiduciary guarantees. So that there are still many Fiduciary recipients who have not registered the Fiduciary Guarantee Deed at the Fiduciary Registration Office and there are still many fiduciary providers who transfer the fiduciary goods to other people without permission from the fiduciary recipient (leasing company), even though the act is a crime.*

Keywords: Law Enforcement, Crime, Fiduciary.

